UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 39.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). *Pedoman Tata Kelola SDM Rumah Sakit Swasta*. Jakarta: ARSSI, 2022.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 45–46

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Konsil Kedokteran Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, 2012.

Konsil Kedokteran Indonesia. *Pedoman Registrasi dan Izin Praktik*, 2022.

National Health Service (NHS). *NHS Workforce Report*. London: NHS England, 2022.

Hanafiah, M. Jusuf, Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2021.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2020.

Sutarto, Adi. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sampurna, Budi, dkk. *Bioetik dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Dwipar, 2005.

Seno Adji, Indriyanto. *Malpraktik Kedokteran dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2003.

Syahrul, Machmud. *Penegakan Hukum Profesi Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

NHS England. NHS Workforce Report. London: NHS England, 2022.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sampurna, Budi dkk. Bioetik dan Hukum Kedokteran. Jakarta: Pustaka Dwipar, 2005.

Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Journal

Hasan, Muhammad, Dumilah Ayuningtyas, dan Misniarti. "Good Corporate Governance Implementation and Performance of Civil Servant." *Kesmas: National Public Health Journal* 11, no. 1 (2016): 20-25. https://scholarhub.ui.ac.id/kesmas/vol11/iss1/4/.

Primawati, Titin, Faizal Madya, dan Agus Priyanto. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna." *Syntax Literate* 10, no. 4 (April 2025). https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/issue/view/148.

Rusydi, Arni Rizqiani, Sukri Palutturi, Noer Bahry Noor, dan Syahrir A. Pasinringi. "The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Public Hospital in Indonesia: A Literature Review." *Enfermería Clínica* 30 (2020): 145–148. DOI: 10.1016/j.enfcli.2019.10.057

Kusumawati, Rina. *Analisis Faktor-Faktor Engagement Dokter Spesialis di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.* Tesis S3, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2402.

Sitohang, Erikkson. "Prinsip Hukum dalam Tata Kelola Rumah Sakit." *Yuridika* 29, no. 1 (2014). https://scispace.com/pdf/prinsip-hukum-dalam-tata-kelola-rumah-sakit-12piptiqd7.

Pramesuari, Florentina Dewi, dan Antonius Sarwono Sandi Agus. "Hak dan Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis." *Jurnal Hukum & HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023).

Bakti, Dhani Waluyo. "Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai: Pola Mutasi, Penghargaan Dan Lingkungan Kerja (Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 1 (2021): 41-50.

Prasetianto, Evan. *Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Jurnal Dunia Ilmu Hukum & Politik* 1, no. 1 (2023): 30–36.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pardomuan, Jaury Douglas, dan Handoyo Prasetyo. "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023." *Jembatan* 1, no. 3 (September 2024).

Hidayanti, H. Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lamongan. Cakrawala: Journal Humaniora, sosial dan Pendidikan 8, No.2 (2018): 45-56.

Partakusuma, Lia G. Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali. Jurnal ARSI 1, no.1 (2014). DOI: https://doi.org/10.7454/arsi.v1i1.2168

Sudiantoro, S. Pengaruh Mutasi Karyawan terhadap Prestasi Kerja. Benefit: Jurnal Bisnis dan Manajemen 18, no.2 (2014):145-152. https://journal.umy.ac.id/index.php/bti/article/download/1387/2442.

Tjung, Lipin. "Keterlekatan Dokter Spesialis di Eka Hospital Bsd-city dan Pekanbaru." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, vol. 15, no. 03, 2012.

Kaharuddin, Andi Tihardimanto. "Perbandingan kualitas patient engagement pada empat pelayanan spesialis dasar di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan." Jurnal Al Hikmah, XV (1) (2014): 43-53.

Mohammadiaghdam, N., Doshmangir, L., Babaie, J. *et al. Determining factors in the retention of physicians in rural and underdeveloped areas: a systematic review*. *BMC Fam Pract* 21, 216 (2020). https://doi.org/10.1186/s12875-020-01279-7

Munir, Nasrullah, dkk. "Problematika Mutasi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Fundamental*, Vol. 10, No. 2 (2021): 97-107.

Nasution, A. H. "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan PTUN)." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1 (2022).

Putra, A., & Hidayat, R. "Dampak Kebijakan Mutasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Daerah." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 11, No. 3 (2023).

Sabaruddin, Abdul. "Implementasi Pasal 73 Terkait Mutasi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Perubahannya." *Global Research and Innovation Journal*, Vol. 1, No. 2 (2025).

Sari, I. P. "Penerapan Sistem Merit dalam Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional Kesehatan: Antara Teori dan Praktik Politisasi." *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2 (2022).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sindar, Syaloom N. C., dkk. "Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah terhadap Pemberian Mutasi Aparatur Sipil Negara." *Lex Crimen*, Vol. 12, No.5 (2024): 1-12.

Gunawan, Y. "Dilema Etik dan Hukum Dokter Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Dalam Kondisi Keterbatasan Fasilitas." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2021).

Makasenggehe, C. J., dkk. "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien." *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 2 (2023).

Pramono, A. "Akibat Hukum Pemutusan Sepihak Hubungan Terapeutik Oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Priyadi, Aris. "Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila*, Vol. 2, No. 1 (2020).

Setiawan, B. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Terputus (Discontinuity of Care) di Rumah Sakit Rujukan." *Jurnal Hukum Kesehatan Nasional*, Vol. 5, No. 2 (2023).

Supriadi, dkk. "Integrasi Kontrak Terapeutik dan Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keadilan Pasien." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2023).

Eman, V. C., dkk. "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Negligence: Analisa Terhadap Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009." *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1 (2022).

Ginting, J.D., dkk. "Risks of Increased Defensive Medicine Due to the Medical World Digitalization and the Legal Implications Based on Indonesian Health Laws." *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 4, No. 1 (2026).

Hakim, L., & Yulia, R. "Tanggung Jawab Renteng (Vicarious Liability) Rumah Sakit terhadap Kerugian Pasien." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2022).

Herawati, N. "Fenomena Praktik Kedokteran Defensif (Defensive Medicine) di Kalangan Dokter Spesialis Akibat Ancaman Kriminalisasi Hukum." *Majalah Kedokteran dan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2023).

Wibowo, A. "Tanggung Gugat Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Kelalaian Sistemik Dalam Pelayanan Medis (Analisis Doktrin Corporate Negligence)." *Jurnal Yustisia*, Vol. 12, No. 3 (2024).

B. Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Terputus (Discontinuity of Care)," Jurnal Hukum Kesehatan Nasional 5, no. 2 (2023);

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A. Pramono, "Akibat Hukum Pemutusan Sepihak Hubungan Terapeutik Oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan," Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (2023); Supriadi dkk., "Integrasi Kontrak Terapeutik dan Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keadilan Pasien," Jurnal Supremasi Hukum 19, no. 1 (2023).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 186 dan 174 ayat (2); V. C. Eman dkk., "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Negligence," Lex Privatum 10, no. 1 (2022); A. Wibowo, "Tanggung Gugat Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Kelalaian Sistemik Dalam Pelayanan Medis," Jurnal Yustisia 12, no. 3 (2024); L. Hakim dan R. Yulia, "Tanggung Jawab Renteng (Vicarious Liability) Rumah Sakit terhadap Kerugian Pasien," Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2022).

Bakti, Dhani Waluyo. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai: Pola Mutasi, Penghargaan Dan Lingkungan Kerja (Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia)." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 2, no. 1 (2021): 41-50.

Eman, V. C. dkk. "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Negligence: Analisa Terhadap Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009." Lex Privatum 10, no. 1 (2022).

Faisal dan Irwansyah. "Penerapan Asas Kepercayaan (*Legitimate Expectation*) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelayanan Publik." Administrative Law & Governance Journal 3, no. 2 (2020).

Ginting, J. D. dkk. "Risks of Increased Defensive Medicine Due to the Medical World Digitalization and the Legal Implications Based on Indonesian Health Laws." Sinergi International Journal of Law 4, no. 1 (2026).

Hakim, L., dan R. Yulia. "Tanggung Jawab Renteng (Vicarious Liability) Rumah Sakit terhadap Kerugian Pasien." Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2022).

Hasan, Muhammad, Dumilah Ayuningtyas, dan Misniarti. "Good Corporate Governance Implementation and Performance of Civil Servant." Kesmas: National Public Health Journal 11, no. 1 (2016): 20-25.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Makasenggehe, C. J. dkk. "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien." Lex Privatum 11, no. 2 (2023).

Nasution, A. H. "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan PTUN)." Jurnal Hukum Administrasi Negara 5, no. 1 (2022).

Partakusuma, Lia G. "Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali." Jurnal ARSI 1, no. 1 (2014).

Pramesuari, Florentina Dewi, dan Antonius Sarwono Sandi Agus. "Hak dan Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis." Jurnal Hukum & HAM Wara Sains 2, no. 9 (2023).

Prasetianto, Evan. "Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit." Jurnal Dunia Ilmu Hukum & Politik 1, no. 1 (2023): 30-36.

Primawati, Titin, Faizal Madya, dan Agus Priyanto. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna." Syntax Literate 10, no. 4 (April 2025).

Sari, I. P. "Penerapan Sistem Merit dalam Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional Kesehatan: Antara Teori dan Praktik Politisasi." Jurnal Birokrasi & Pemerintahan 8, no. 2 (2022).

Setiawan, B. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Terputus (Discontinuity of Care) di Rumah Sakit Rujukan." Jurnal Hukum Kesehatan Nasional 5, no. 2 (2023).

Sindar, Syaloom N. C. dkk. "Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah terhadap Pemberian Mutasi Aparatur Sipil Negara." Lex Crimen 12, no. 5 (2024).

Sitohang, Erikkson. "Prinsip Hukum dalam Tata Kelola Rumah Sakit." Yuridika 29, no. 1 (2014).

Supriadi dkk. "Integrasi Kontrak Terapeutik dan Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keadilan Pasien." Jurnal Supremasi Hukum 19, no. 1 (2023).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Syaloom N. C. Sindar dkk., "Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah terhadap Pemberian Mutasi ASN," Lex Crimen 12, no. 5 (2024); Evan Prasetianto, "Upaya Pemenuhan Dokter Spesialis Berstatus ASN di RSUD," Jurnal Dunia Ilmu Hukum & Politik 1, no. 1 (2023): 30-36;

Syahbudin, Dovi Hakiki. "Implikasi Pendayagunaan Dokter Spesialis terhadap Pemerataan Pelayanan Kesehatan Spesialistik dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Kajian deskriptif-analitis, 2020.

Wibowo, A. "Tanggung Gugat Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Kelalaian Sistemik Dalam Pelayanan Medis (Analisis Doktrin Corporate Negligence)." Jurnal Yustisia 12, no. 3 (2024).

Sumber Berita dan Media Daring

Akar Aksi Pita Hitam: Polemik Mutasi Dokter Anak oleh Kemenkes.Tirto.id, 7 Mei 2025. https://tirto.id/akar-aksi-pita-hitam-polemik-mutasi-dokter-anak-oleh-kemenkes-hbnq.

Dirgantara, Adhyasta, dan Jessi Carina. "Sejumlah Dokter Dimutasi dan Diberhentikan Mendadak oleh Kemenkes." Kompas.com, 4 Mei 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/04/23262211/sejumlah-dokter-dimutasi-dan-diberhentikan-mendadak-oleh-kemenkes.

FSPMKI Soroti Mutasi Mendadak dr. Piprim, Desak Kemenkes Fokus pada Perbaikan Layanan Kesehatan." Sinpo.id, 2 Mei 2025. https://sinpo.id/detail/95703/fspmki-soroti-mutasi-mendadak-dr-piprim-desak-kemenkes-fokus-pada-perbaikan-layanan-kesehatan.

IDAI Mengadu ke DPR seusai Kemenkes Mutasi Sepihak Dokter Anak. Tempo.co, 7 Mei 2025. https://www.tempo.co/politik/idai-mengadu-ke-dpr-seusai-kemenkes-mutasi-sepihak-dokter-anak--1364470.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IDAI Tunggu Dialog dengan Kemenkes Soal Mutasi Sepihak Dokter Anak.Tempo.co, 7 Mei 2025.

Kemenkes Akui Alat Kesehatan di Sejumlah RSUD dan RS Vertikal Masih Kurang. Antara News, 15 Juli 2023.

Kesaksian Dokter Spesialis di MK: Dipecat karena Menkes Tersinggung Tulisan. Detik News, 23 Mei 2025. https://news.detik.com/berita/d-7928741/kesaksian-dokter-spesialis-di-mk-dipecat-karena-menkes-tersinggung-tulisan.

Ketua IDAI Piprim Basarah: RUU Kesehatan Berpotensi Kriminalisasi dan Bungkam Kritis Dokter. Republika.co.id, 15 Mei 2023.

Mutasi Dokter oleh Kemenkes secara Mendadak, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Kompas.com, 5 Mei 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/05/104500765/mutasi-dokter-oleh-kemenkes-secara-mendadak-apa-yang-sebenarnya-terjadi.

Muttaqin, Zainal. Mengapa Saya Dipecat?" Kumparan, 22 Mei 2023. https://kumparan.com/zainalmuttaqin/mengapa-saya-dipecat-20Rphk5F1kC.

Muttaqin, Zainal. Mutasi Mendadak dan Pemecatan Dokter Spesialis: Arogansi dan Abuse of Power Menkes demi Membungkam Kritik dan Perbedaan Pendapat. Ceknricek.com, 16 Februari 2026. https://ceknricek.com/mutasi-mendadak-dan-pemecatan-dokter-spesialis-arogansi-dan-abuse-of-power-menkes-demi-membungkam-kritik-dan-perbedaan-pendapat-2/.

RSUP Kariadi Akui Berhentikan Prof Zainal Muttaqin Karena Kritik ke Kemenkes. Democrazy.id, 20 April 2023. https://www.democrazy.id/2023/04/rsup-kariadi-akui-berhentikan-prof.html.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGATURAN MUTASI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Nabila Khairunisa, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sumber Wawancara

Narasumber (Dokter Spesialis di Rumah Sakit Vertikal wilayah Jawa). Wawancara langsung oleh Nabila Khairunisa. Semarang, 14 Januari 2026. Transkrip ada pada penulis.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jo. PP Nomor 17 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 67; C. J. Makasenggehe dkk., "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien," Lex Privatum 11, no. 2 (2023).

Conscientious Objection Before the Indonesian Constitutional Court," Constitutional Review 8, no. 1 (2022): 62-86, https://doi.org/10.31078/consrev825.